



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XVI TAHUN 2021  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI JAWA TIMUR



**SINERGIS  
INOVATIF  
AKUNTABEL  
PROFESIONAL**

**PENINGKATAN  
PEMANTAUAN DAN REVIU  
MANAJEMEN RISIKO**

Be **BOLD**  
Make **CHANGES**



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO YANG DINAMIS **SiMeryd**

# 7 PROGRAM KERJA PRIORITAS KEJAKSAAN RI TAHUN 2021



**BURHANUDDIN**  
**JAKSA AGUNG RI**

- 1** Pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional.
- 2** Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional.
- 3** Pembentukan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
- 4** Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
- 5** Penegakkan hukum yang berkeadilan serta memberikan kemanfaatan khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.
- 6** Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.
- 7** Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala limpahan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan Kertas Kerja Implementasi Aksi Perubahan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Aksi Perubahan ini mengambil judul: Peningkatan Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko Biro Perencanaan Menggunakan Aplikasi Online Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Wakil Jaksa Agung RI;
2. Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Bapak Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
5. Bapak Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
6. Bapak Kepala Biro Perencanaan selaku Mentor;
7. Bapak dan Ibu Widyaistrar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, terutama Bapak Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H., selaku Coach yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Kertas Kerja Laporan Aksi Perubahan ini;
8. Seluruh Panitia Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2021;
9. Keluargaku yang telah memberikan dukungan hingga selesainya proses pendidikan dan pelatihan ini;

Dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Demikian penulis mengharapkan semoga dari kertas kerja Laporan Aksi Perubahan ini kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Jakarta, Juli 2021

Sosialisasi tentang manajemen risiko yang masih kurang produk hukum yang ada yaitu Peraturan Kejaksaan No 6 Tahun 2020 lahir pada bulan mei 2020 .

Pemahaman Tim Manajemen risiko yang belum memadai Identifikasi risiko atas risiko atau potensi risiko dalam organisasi belum komprehensif

Kurangnya kesadaran dan kepedulian pegawai kejaksaan terhadap pentingnya pengendalian atas risiko

Belum adanya aplikasi online yang berkolaborasi guna pemantauan dan reviu antara bidang pembinaan dan APIP yaitu bidang pengawasan guna menilai kualitas laporan pengendalian risiko pada satuan / unit kerja



Terdakwa di depok bawa kabur mobil tahanan.



Diduga Hilang Kendali, Mobil Tahanan Kejari Mentawai Tabrak Pohon di Padang

### Risiko

adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian Tujuan dan/ atau Sasaran Organisasi

### Manajemen Risiko

adalah pendekatan sistematis yang meliputi substansi, struktur, dan budaya organisasi untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan dan/ atau Sasaran Organisasi.

### Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi

adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi misi organisasi

### Identifikasi Risiko

adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan/ atau Sasaran Organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur

### Analisis Risiko

adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan dan/ atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara probabilitas risiko dengan konsekuensi risiko

### Peta Risiko

adalah gambaran tentang seluruh exposure risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing- masing risiko.

### Evaluasi Risiko

adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.

### Penanganan Risiko

adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian

### Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP

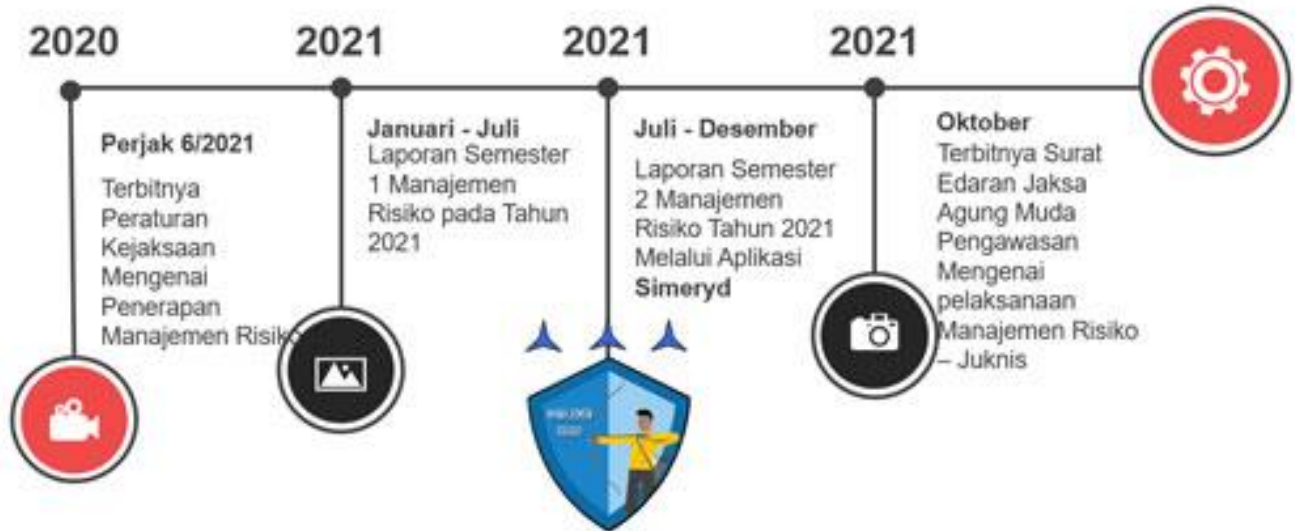
adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan

### Pemantauan dan reuiu

adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko

## Kondisi Faktual Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko Sebagai Bagian Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



Tercapainya tema proper yang disetujui dengan mentor. Selain itu juga meminta dukungan pelaksanaan aksi perubahan dengan BPKP Pusat, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Stake Holder terkait lainnya.



Wakil Jaksa Agung RI selaku ketua Tim pengarah Reformasi Birokrasi yang menggerakkan dan menjadi role model perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penguatan 8 area perubahan dan khususnya atas peningkatan maturitas SPIP yang didalamnya berkaitan dengan Manajemen Risiko

Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku koordinator penerapan manajemen risiko sekaligus sebagai pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan selaku APIP memberikan apresiasi atas proyek perubahan sehingga proyek perubahan ini dapat mendorong proses pemantauan dan revidi dengan lebih cepat.



Selaku Pembina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Project Leader melakukan kunjungan dengan Bapak Jamwas di kantor BPKP Pusat dan ditemui Kepala BPKP bapak Muhammad Yusuf Ateh



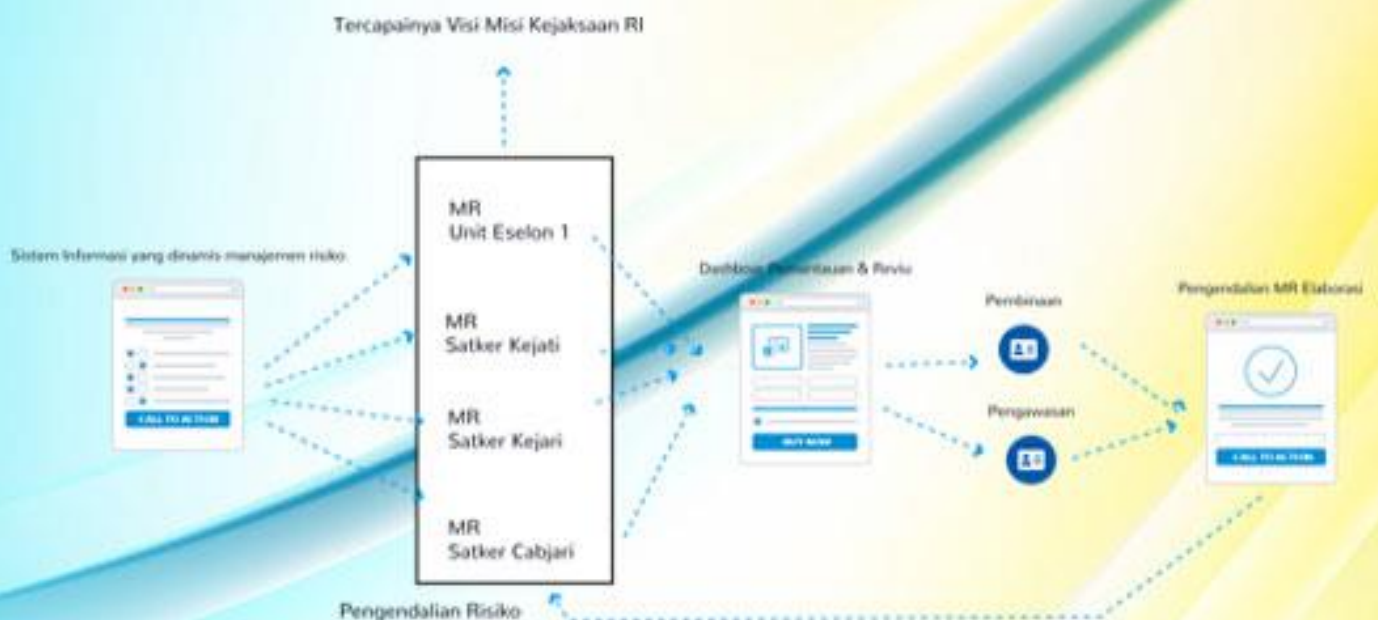


Dukungan internal diberikan oleh bapak Bambang Sugeng Rukmono selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan



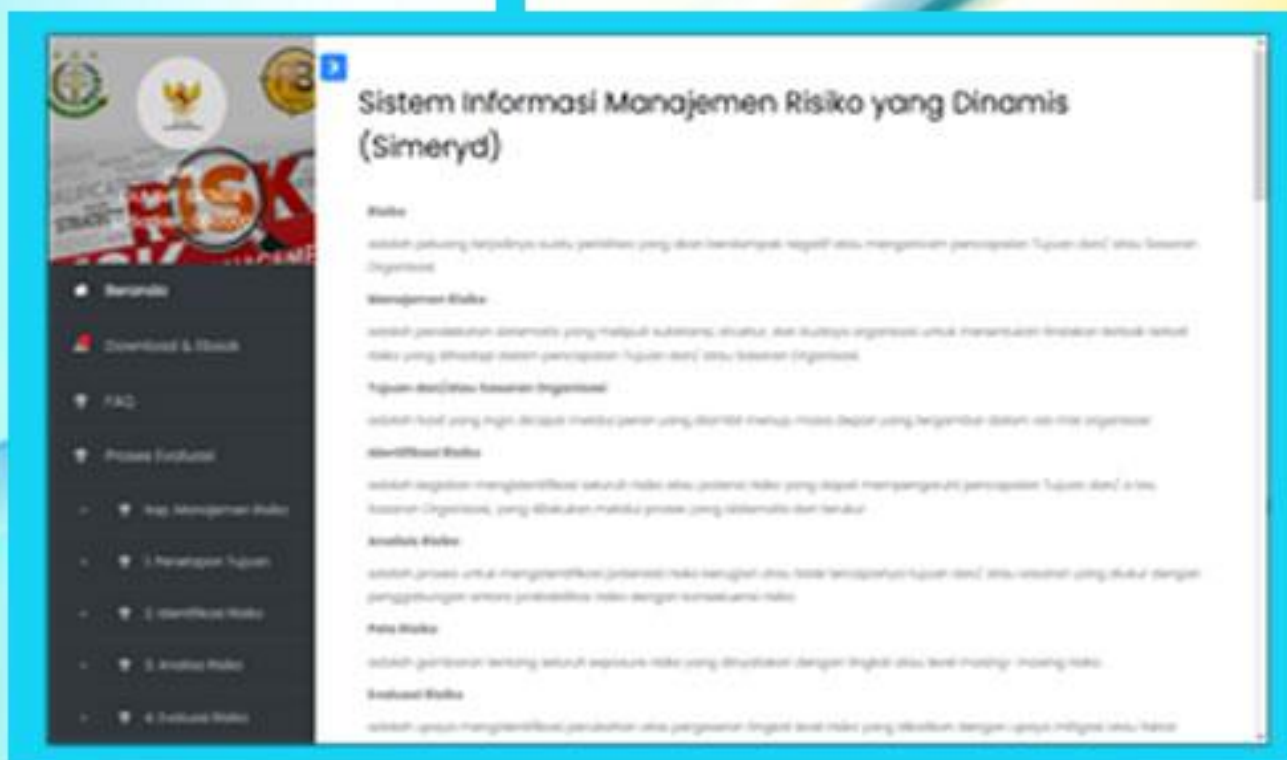


## SiMeryd

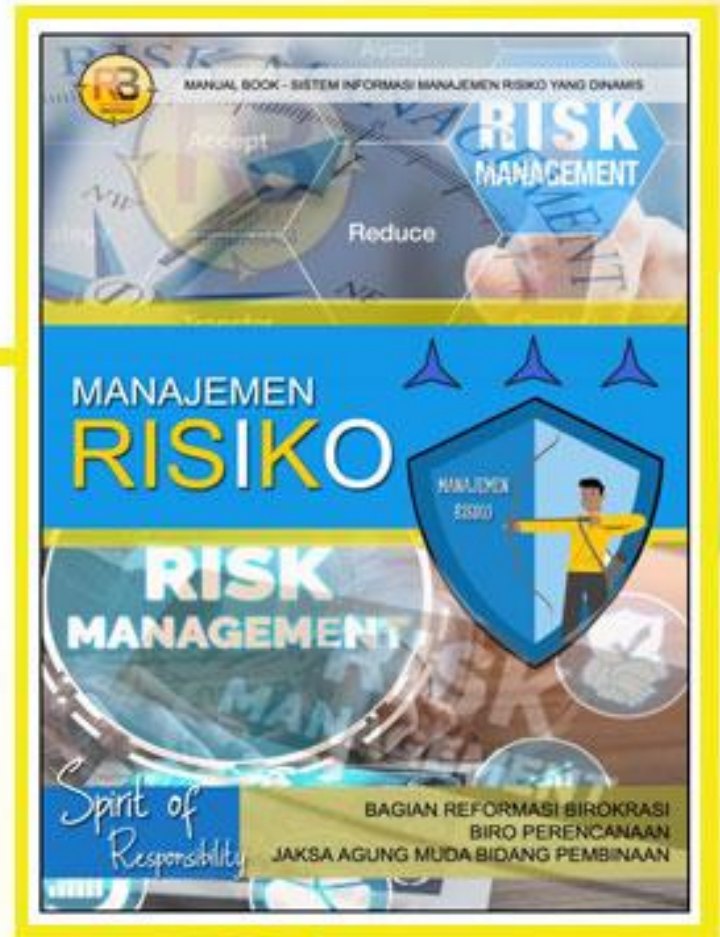
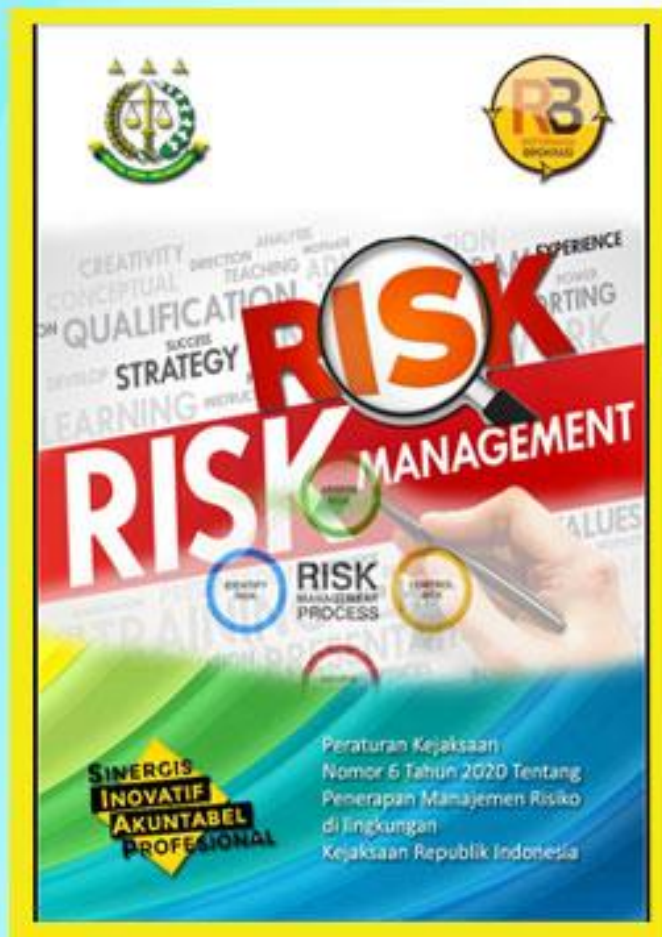


ISO 31000 adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization pada tanggal 13 November 2009. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Sesuai dengan hasil desain dan alur pelayanan aplikasi yang kemudian dibuat dipasang pada website Pembinaan Kejaksaan Agung dengan alamat <https://pembinaan.kejaksaan.go.id/SPIP> dengan sebutan nama aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dinamis atau SiMeryd



Selanjutnya untuk mempermudah sosialisasi dan proses transfer knowledge Pembuatan alat peraga aplikasi penting dilakukan



Agar pemahaman atas manajemen risiko dapat berjalan dengan baik dilakukan sosialisasi tentang penerapan manajemen risiko dan pelaporan melalui aplikasi Simeryd yang dilakukan secara daring maupun luring

The collage illustrates the implementation of risk management through the Simeryd application. It features several key elements:

- Zoom Meeting:** A large screenshot of a Zoom meeting in progress. The main window shows a speaker at a podium in a formal setting with Indonesian and provincial flags. The top of the screen displays a grid of other participants.
- Official Document:** A yellow document from the "KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG" (Prosecution Office of the Republic of Indonesia). It is a letter dated 12 September 2021, regarding the implementation of the Risk Management Information System (SIMERYD).
- Meeting Agenda:** A document titled "LAPORAN PELAKSANAAN REUNION FOKUSING BAKALANJARAN BUNDA DAN PENGUNJUKAN KOPERASI INFORMASI MANAJEMEN RISIKO (MIR) DAN SIMERYD" (Meeting Report of the Focusing Meeting of the Bundo and Information Management Risk Management Cooperation and SIMERYD). It lists the date (12 September 2021), time (09:00-11:00), and location (Zoom Meeting).
- Meeting in Progress:** A screenshot of a meeting with participants seated at a long table. A banner in the background reads "PEKERJAAN MANAJEMEN RISIKO (MIR) DAN SIMERYD" (Risk Management Work (MIR) and SIMERYD). A name tag for "JAMWAS" is visible.
- Simeryd Application Screenshot:** A screenshot of the Simeryd application interface, titled "Sistem Informasi Manajemen Risiko yang Dinamis (si- Mr YD)". It shows a user interface with various data fields and a list of items.

Kesempatan sosialisasi juga dilakukan secara luring pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Bahwa pentingnya penerapan manajemen risiko



Penyerahan perangkat sosialisasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

## Dukungan Internal dan External dalam bentuk Video



## Dukungan Internal & Eksternal Atas Aksi Perubahan

### Dukungan Internal

Stake holder internal terkait

1. Wakil Jaksa Agung RI
2. Jaksa Agung Muda Pembinaan
3. Jaksa Agung Muda Pengawasan
4. Kepala Biro Perencanaan

### Dukungan Eksternal

Stake holder external terkait

1. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Pada BPKP Pusat

# Manfaat

Manfaat atas pelaksanaan proyek perubahan



## Simeryd

### **Bagi Diri Pribadi**

Sebagai Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dengan pelaksanaan manajemen risiko dapat meningkatkan nilai antara index SPIP sehingga nilai RB dapat meningkat

### **Bagi Pimpinan**

Dapat dipantaunya satker/unit kerja yang melaksanakan kewajiban pelaporan manajemen sebagaimana dalam peraturan normative yang telah ditetapkan (Perjak 6/2021)

### **Bagi Stake Holder Terkait**

Manajemen risiko adalah hal penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Sehingga pencapaiannya dapat di evaluasi Bersama dengan stake holder terkait.



## Kesimpulan

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini project leader tidak mengalami kendala signifikan oleh karena penerapan manajemen risiko telah menjadi aturan normatif namun memerlukan penegasan melalui surat edaran dalam pelaksanaannya sehingga kemudian dibuatlah bersama dengan biro hukum. Bahwa berkaitan dalam pelaksanaan kedepannya, apabila aplikasi nantinya mengalami perubahan oleh karena kebijakan, namun tata Kelola yang ada dalam penerapan aplikasi ini yang telah disusun sesuai dengan proses bisnis maka kemungkinan dilakukan perubahan tidak akan menyimpang jauh dari yang sudah ditetapkan saat ini.



## Saran

Oleh karena telah diperkuat dalam penerapan manajemen risiko melalui surat edaran maka dalam fungsi pemantauan dan revidi dapat dijalankan, sehingga tujuan dari penerapan aplikasi ini dapat maksimal dan bermanfaat namun perlu dilakukan pengawasan oleh APIP atas laporan dari satuan /unit kerja yang ada. Sebagai unit kepatuhan pada Kejaksaan Bidang Pengawasan dapat memasukkan pelaksanaan Manajemen Risiko dalam PKP (Program Kerja Pengawasan) maupun PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)



